

DAFTAR PUSTAKA

- Edward Mandala dan Rendra Setyadiharja, Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi Kasus di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang), (STISIPOL TanjungPinang: 2016)
- Handyaningrat, S. (2012). *Proses dalam Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: Badudu, J. S., & Zain, S. M. (2010). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Pambudi, Hasan. (2012). *Penerbitan dan Publikasi*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Hidayat, Edy N, Referensi Kepelabuhan Seri 05 Peralatan Pelabuhan, (Surabaya,2009)
- Ilmar, Aminuddin. (2014). *Wewenang Pemerintahan dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit
- JakartaWibowo, H. (2022). *Peran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Keselamatan Maritim*. Yogyakarta Hidayat, R. (2023). *Fungsi dan Tujuan Surat Persetujuan Berlayar dalam Operasional Kapal*. Bandung
- Jinca M. Y. Transportasi Laut kapal Layar Motor Pinisi, Makassar: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, 2002
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Kepelabuhanan, Jakarta, 2010
- Kramadibrata, S. Perencanaan Pelabuhan Edisi Kedua, (Bandung: Penerbit ITB,2002) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3 Tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan*. Jakarta: